

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pengangguran masih menjadi salah satu permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia, berdasarkan data yang tercatat pada Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah pengangguran di Indonesia pada Agustus 2022 sebanyak 8,42 juta orang atau pada persentase 5,86%. Angka itu menurun dari 6,49% atau lebih tepatnya berkurang sekitar 680 ribu orang dibandingkan agustus tahun 2021. Akan tetapi jika dibandingkan dengan Februari 2022 maka jumlahnya naik sekitar 20 ribu orang atau rasionya naik 0,03%.

BPS mendefinisikan TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) sebagai persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Jumlah angkatan kerja terdiri dari akumulasi angka penduduk usia kerja 15 tahun ke atas yang telah bekerja aktif maupun berhalangan sementara dan angka penduduk usia kerja yang sedang mennganggur.

Per Agustus 2022 BPS telah merilis tingkat pengangguran terbuka pada 34 Provinsi di Indonesia. Berikut merupakan 10 besar Provinsi dengan tingkat pengangguran terbuka tertinggi di Indonesia pada Agustus 2022 :

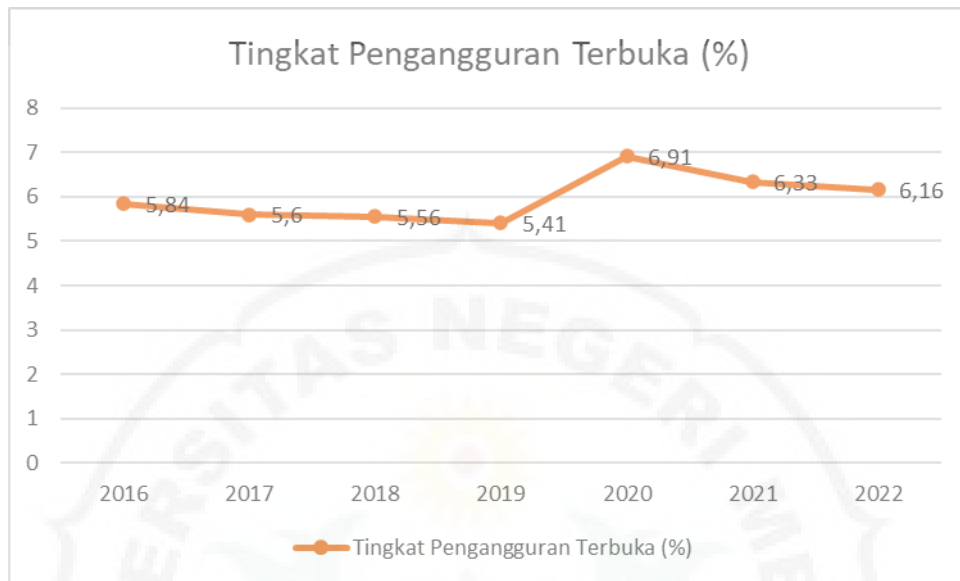
Tabel 1.1. 10 Provinsi dengan Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka Tertinggi di Indonesia Tahun 2022

No	Nama Provinsi	Persentase TPT
1	Jawa Barat	8,31 %
2	Kepulauan Riau	8,23 %
3	Banten	8,09 %
4	DKI Jakarta	7,18 %
5	Maluku	6,88 %
6	Sulawesi Utara	6,61 %
7	Sumatera Barat	6,28 %
8	Aceh	6,17 %
9	Sumatera Utara	6,16 %
10	Kalimantan Timur	5,71 %

Sumber : BPS 2023

Pada table di atas dapat kita lihat bahwa Sumatera Utara berada pada posisi ke 9 dalam hal tingkat pengangguran terbuka tertinggi di Indonesia pada agustus 2022 yang mencapai 6,16 %, dimana angka ini mengalami kenaikan 0,69 % dari bulan Februari 2022 yang hanya mencapai 5,47 %.

Dalam kurun waktu 7 tahun terakhir Tingkat Pengangguran Terbuka di Sumatera Utara dapat dilihat pada grafik berikut :



Sumber : BPS 2023

Gambar 1.1. Tingkat Pengangguran Terbuka di Sumatera Utara Periode 2016 - 2022

Gambar 1.1. menunjukkan adanya fluktuasi terhadap tingkat pengangguran terbuka di Sumatera Utara. Periode 2016 sampai 2019 tingkat pengangguran terbuka secara konsisten mengalami penurunan, namun pada tahun 2020 mengalami peningkatan yang cukup signifikan sebesar 1,5% dari 5,41% menjadi 6,91%. Hal ini kemungkinan diakibatkan oleh pandemi covid – 19 yang mulai mewabah di Indonesia pada awal 2020. Pada periode 2020 sampai 2022 kembali terjadi penurunan secara konsisten namun angkanya belum sampai seperti pada tahun 2019 sebelum pandemi covid – 19.

Berdasarkan data tersebut tentu mengindikasikan adanya sebuah masalah bahwa kebijakan yang dilakukan belum mampu konsisten dalam menurunkan tingkat pengangguran terbuka. Hal ini tentu menjadi perhatian, faktor apa saja yang mungkin dapat menyebabkan tingkat pengangguran terbuka di suatu daerah tersebut tinggi dan berfluktuasi dari tahun ke tahun khususnya di Provinsi

Sumatera Utara. Ada beberapa faktor yang diduga menyebabkan terjadinya pengangguran diantaranya Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang rendah. Hal ini sesuai dengan penelitian Nurkhasanah & Mahroji (2019) bahwa Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh negative signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka, yang berarti semakin rendah angka IPM maka tingkat pengangguran terbuka semakin tinggi begitupun sebaliknya. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan suatu terobosan dalam menilai pembangunan manusia. Indeks Pembangunan Manusia adalah suatu tolok ukur pembangunan suatu wilayah yang berkorelasi negatif terhadap kemiskinan dan pengangguran di wilayah tersebut . Karena itu diharapkan suatu daerah memiliki Indeks Pembangunan Manusia yang tinggi, idealnya kualitas hidup masyarakat juga tinggi atau dapat dikatakan pula bahwa jika nilai IPM tinggi, maka seharusnya tingkat kemiskinan dan pengangguran rendah. Dikarenakan IPM dihitung berdasarkan data yang dapat menggambarkan keempat komponen, yaitu angka harapan hidup yang mengukur keberhasilan dalam bidang kesehatan, harapan lama sekolah dan rata-rata lamanya bersekolah yang mengukur keberhasilan dalam bidang pendidikan, dan kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mengukur keberhasilan dalam bidang pembangunan hidup layak. Berdasarkan data BPS, Index Pembangunan Manusia (IPM) di Sumatera Utara pada tahun 2022 mencapai 72,71 yang berada pada posisi 15 se Indonesia. Sebagai perbandingan dapat dilihat pada tabel berikut :

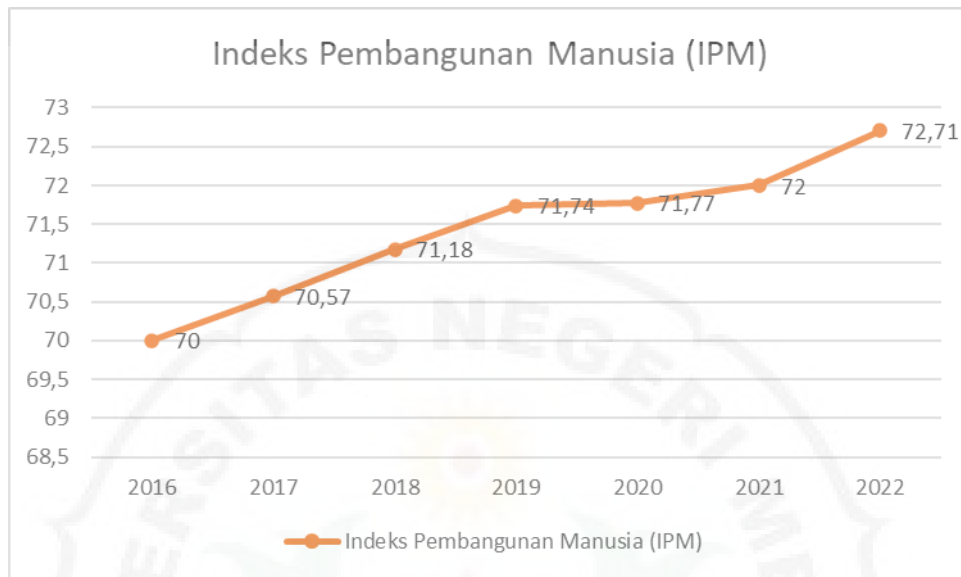
Tabel 1.2. Peringkat 15 Besar IPM Provinsi di Indonesia Tahun 2022

PERINGKAT	PROVINSI	IPM
1	DKI Jakarta	81.65
2	DI Yogyakarta	80.64
3	Kalimantan Timur	77.44
4	Kepulauan Riau	76.46
5	Bali	76.44
6	Sulawesi Utara	73.81
7	Riau	73.52
8	Banten	73.32
9	Sumatera Barat	73.26
10	Jawa Barat	73.12
11	Sulawesi Selatan	72.82
12	Aceh	72.80
13	Jawa Tengah	72.79
14	Jawa Timur	72.75
15	Sumatera Utara	72.71

Sumber : BPS 2023

Berdasarkan tabel tersebut, terlihat meskipun provinsi Sumatera Utara menempati peringkat ke 15 dari 34 provinsi di Indonesia namun masih tertinggal jika dibandingkan dengan Provinsi tetangga seperti Aceh dengan IPM mencapai 72,80, Sumatera Barat dengan IPM mencapai 73,26 dan Riau dengan IPM mencapai 73,52.

Jika dilihat dalam kurun waktu 7 tahun terakhir mulai dari tahun 2016 sampai tahun 2022 indeks pembangunan manusia di provinsi Sumatera Utara dapat dilihat pada grafik berikut :

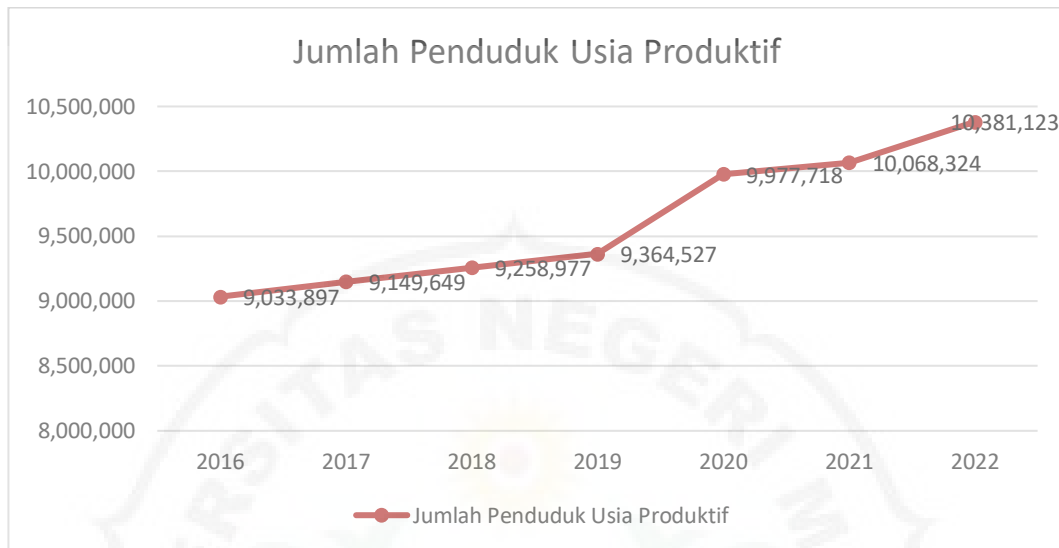


Sumber : BPS 2023

Gambar 1.2. Indeks Pembangunan Manusia di Sumatera Utara Periode 2016 - 2022

Pada grafik tersebut terlihat selama periode 2016 – 2022 terjadi peningkatan angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) secara konsisten atau terus menerus, namun terlihat pada tahun 2020 peningkatan IPM yang terjadi sangat kecil yaitu hanya sebesar 0,03 poin dari 71,74 menjadi 71,77. Namun terjadi gap atau perbedaan hubungan antara indeks pembangunan manusia dengan tingkat pengangguran terbuka, dimana hubungan yang diduga negatif yaitu ketika indeks pembangunan manusia meningkat maka tingkat pengangguran terbuka akan menurun. Namun pada tahun 2020 ketika angka indeks pembangunan manusia di Sumatera Utara meningkat, tingkat pengangguran di Sumatera Utara juga meningkat. Hal ini tentu menjadi sebuah permasalahan tentang konsistensi pengaruh negatif antara indeks pembangunan manusia terhadap tingkat pengangguran terbuka.

Faktor selanjutnya yang diduga mempengaruhi tingkat pengangguran terbuka adalah Jumlah Penduduk Usia Produktif, yang dimana jika Jumlah Penduduk Usia Produktif semakin banyak maka jumlah angkatan kerja juga semakin banyak, dalam hal ini yang Jumlah Penduduk Usia Produktif yang dimaksud adalah Jumlah Penduduk Usia Produktif usia produktif. BPS (2023) Mendefinisikan penduduk usia produktif adalah penduduk yang berusia mulai dari 15 – 64 tahun. Masyarakat yang telah lulus dan menjadi seorang sarjana dan warga lulusan SMA/ SMK maupun SMP yang telah siap kerja memiliki peluang yang sama untuk mendapatkan suatu pekerjaan sesuai dengan kemampuannya. Namun, banyaknya penduduk yang siap kerja tersebut harus bersaing ketat, karena lapangan kerja yang tersedia tidak banya sehingga menyebabkan terjadinya pengangguran. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Hidayat & Muminin (2017) bahwa Jumlah Penduduk Usia Produktif berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka yang berarti jika Jumlah Penduduk Usia Produktif semakin tinggi maka tingkat pengangguran terbuka juga semakin tinggi. Berdasarkan data pada Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2022 Jumlah Penduduk Usia Produktif usia produktif di Sumatera Utara adalah sebanyak 10.381.123 orang dan dalam kurung waktu 7 tahun terakhir Jumlah Penduduk Usia Produktif usia produktif di Sumatera Utara dapat dilihat pada grafik berikut :



Sumber : BPS 2023

Gambar 1.3. Jumlah Penduduk Usia Produktif Sumatera Utara Periode 2016 - 2022

Berdasarkan gambar 1.3 tersebut, dapat dilihat bahwa Jumlah Penduduk Usia Produktif usia produktif di Sumatera Utara setiap tahunnya terus mengalami peningkatan, namun terdapat gap antara teori dengan data dimana kenaikan jumlah penduduk usia produktif tersebut tidak menyebabkan tingkat pengangguran meningkat, justru tingkat pengangguran terbuka di Sumatera Utara cenderung menurun.

Penyebab berikutnya yang diduga mempengaruhi tingkat pengangguran terbuka adalah besaran Upah minimum. Hal ini juga disampaikan oleh Khoirunnisa (2020) bahwa Upah Minimum berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka, yang artinya semakin tinggi upah minimum maka tingkat pengangguran terbuka semakin rendah. Hal ini disebabkan karena semakin tinggi upah minimum suatu daerah maka keinginan atau motivasi

angkatan kerja untuk mencari kerja atau mendapatkan pekerjaan semakin tinggi yang nantinya akan menurunkan angka atau tingkat pengangguran terbuka.

Berikut merupakan daftar peringkat 15 besar Upah Minimum Provinsi tertinggi di Indonesia tahun 2022 :

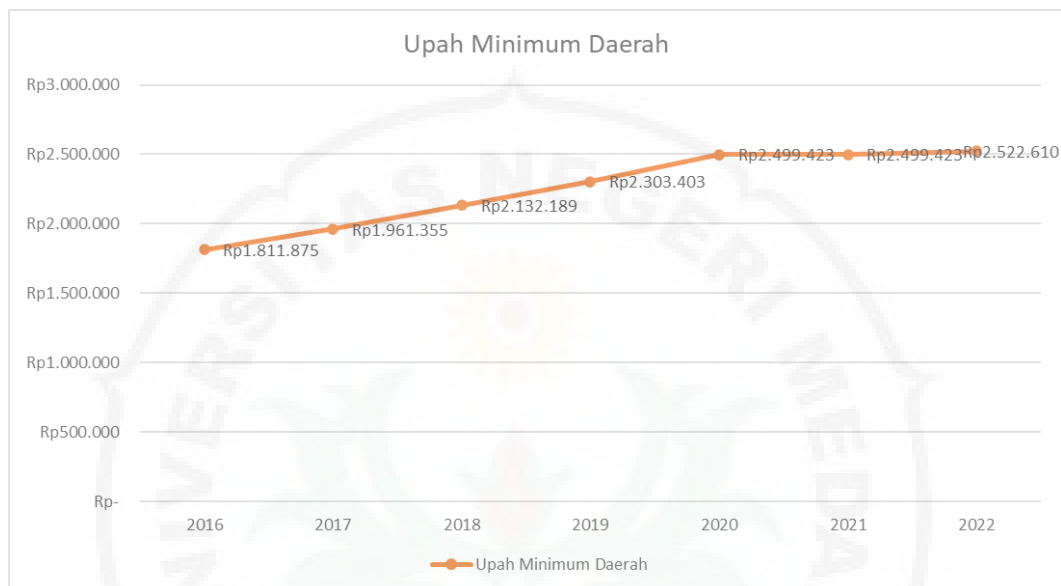
Tabel 1.3. 15 Provinsi dengan Upah Minimum Tertinggi di Indonesia Tahun 2022

Peringkat	Provinsi	UMP tahun 2022
1	DKI Jakarta	Rp4.641.854
2	Papua	Rp3.561.932
3	Sulawesi Utara	Rp3.310.723
4	Kep. Bangka Belitung	Rp3.264.884
5	Papua Barat	Rp3.200.000
6	Aceh	Rp3.166.460
7	Sulawesi Selatan	Rp3.165.876
8	Sumatra Selatan	Rp3.144.446
9	Kep. Riau	Rp3.050.172
10	Kalimantan Utara	Rp3.016.738
11	Kalimantan Timur	Rp3.014.497
12	Riau	Rp2.938.564
13	Kalimantan Tengah	Rp2.922.516
14	Kalimantan Selatan	Rp2.906.473
15	Maluku Utara	Rp2.862.231

Sumber : BPS 2023

Berdasarkan tabel tersebut dapat kita lihat bahwa Upah Minimum Provinsi (UMP) tertinggi di Indonesia pada tahun 2022 adalah DKI Jakarta yang merupakan ibukota negara Republik Indonesia. Sedangkan Sumatera Utara tidak masuk ke dalam 15 provinsi dengan UMP tertinggi, karena Sumatera Utara hanya menempati posisi ke 21. Berdasarkan kutipan dari beritasatu.com bahwa pada tahun 2022 besaran Upah Minimum Provinsi Sumatera Utara mencapai Rp 2.522.609,- dan di 2023 naik 7,45 persen menjadi Rp 2.710.493,-.

Dalam kurun waktu 2016 – 2022 upah minimum provinsi Sumatera Utara dapat dilihat pada grafik berikut :



Sumber : BPS 2023

Gambar 1.4. Upah Minimum Provinsi Sumatera Utara 2016 - 2022

Berdasarkan gambar 1.4 tersebut dapat dilihat bahwa grafik menunjukkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Sumatera Utara dalam kurun waktu periode 2016 – 2022 cenderung mengalami peningkatan, hanya saja pada tahun 2021 angkanya sama dengan tahun 2020. Namun cenderung meningkatnya UMP di Sumatera Utara tidak selalu menyebabkan tingkat pengangguran terbuka di Sumatera Utara menurun. Pada tahun 2020 terjadi kenaikan upah minimum sebesar Rp 196.020,- namun tingkat pengangguran pada tahun 2020 malah mengalami peningkatan. Jika kita bandingkan besaran upah minimum provinsi Sumatera Utara pada tahun 2022 tentu angkanya lebih besar daripada pada tahun 2019, namun tingkat pengangguran pada tahun 2022 justru lebih tinggi jika dibandingkan pada tahun 2019.

Beberapa factor yang kemungkinan mempengaruhi tingkat pengangguran terbuka di Sumatera Utara tersebut tak terlepas dari sumbangsih masing – masing factor tersebut disetiap kabupaten kota yang ada di Sumatera Utara. Karena tentunya lapangan kerja sebarannya lebih banyak berada disetiap daerah yang artinya berada di tiap kabupaten kota yang ada. Maka dari itu, penelitian kali ini akan menggunakan data – data yang ada pada setiap kabupaten kota di Sumatera Utara meliputi : Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Jumlah Penduduk Usia Produktif, Upah Minimum Kabupaten (UMK) dan tingkat pengangguran terbuka. Berdasarkan hal tersebut maka peneliti menganggap penelitian ini penting untuk dilakukan untuk melihat pengaruh factor – factor tersebut dengan tingkat pengangguran terbuka di tiap kabupaten kota yang ada di Sumatera Utara. dengan judul **“Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Jumlah Penduduk Usia Produktif dan Upah minimum terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Sumatera Utara Periode 2016 - 2022”**.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut :

1. Tingkat pengangguran terbuka yang masih tinggi di Sumatera Utara
2. Index pembangunan manusia Sumatera Utara yang masih rendah dibandingkan dengan Provinsi sekitar
3. Jumlah Penduduk Usia Produktif usia produktif Sumatera Utara yang tidak sebanding dengan lapangan kerja

4. Upah Minimum Sumatera Utara yang tergolong masih rendah

1.3. Pembatasan Masalah

Penelitian ini berfokus pada hubungan antara indeks pembangunan manusia, Jumlah Penduduk Usia Produktif dan upah minimum terhadap tingkat pengangguran terbuka di Sumatera Utara, yang dimana menggunakan data yang diambil dari setiap kabupaten/ kota yang ada di Provinsi Sumatera Utara dalam kurun waktu 2016 - 2022.

1.4. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yang telah diuraikan sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Sumatera Utara periode 2016 - 2022?
2. Apakah terdapat pengaruh Jumlah Penduduk Usia Produktif terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Sumatera Utara periode 2016 - 2022?
3. Apakah terdapat pengaruh Upah minimum terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Sumatera Utara periode 2016 - 2022?
4. Apakah terdapat pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Jumlah Penduduk Usia Produktif, dan Upah minimum secara simultan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Sumatera Utara periode 2016 - 2022?

1.5. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan yang dicapai penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Sumatera Utara periode 2016 – 2022
2. Untuk mengetahui pengaruh Jumlah Penduduk Usia Produktif terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Sumatera Utara periode 2016 - 2022
3. Untuk mengetahui pengaruh Upah minimum terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Sumatera Utara periode 2016 - 2022
4. Untuk mengetahui pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Jumlah Penduduk Usia Produktif, dan Upah minimum secara simultan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Sumatera Utara periode 2016 – 2022

1.6. Pemecahan Masalah

Setelah mengetahui pengaruh dari masing – masing penyebab pengangguran terbuka, maka untuk mengurangi tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Sumatera Utara adalah dengan mengurangi atau meningkatkan penyebab – penyebab dari pengangguran tersebut sesuai dengan pengaruhnya.

1.7. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian diharapkan mampu bermanfaat bagi seluruh pihak antara lain:

1. Bagi peneliti, guna mengembangkan wawasan peneliti mengenai Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Jumlah Penduduk Usia Produktif dan

Upah minimum terhadap Tingkat Pengangguran serta untuk syarat dalam menyelesaikan program sarjana ekonomi Universitas Negeri Medan.

2. Bagi akademis, penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk kepentingan ilmiah dan kontribusi untuk peneliti terkait pengangguran di masa depan serta menambah informasi dan bermanfaat bagi ilmu pengetahuan.
3. Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam mengambil keputusan guna mengurangi tingkat pengangguran terbuka pada setiap Kabupaten/ Kota yang ada di Provinsi Sumatera Utara.

